



PILKADA LEWAT DPRD: SATU PER SATU PARTAI SEPAKAT

Di tengah hiruk-pikuk bencana yang melanda, ternyata dunia perpolitikan Indonesia tinggal beberapa langkah lagi menuju 'era baru rasa lama'. Dorongan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD mulai diterima oleh partai politik (parpol). Terbaru, dukungan diberikan Nasdem dengan mengatakan Pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-undang Dasar NKRI 1945, serta Pancasila. Sebelumnya, Golkar, PKB, Gerindra hingga PKS mengemukakan hal senada. Alasan klasik kembali dikedepankan, mulai dari mahalnya biaya kontestasi hingga maraknya praktik politik uang yang dianggap sulit diberantas dalam skema pilkada langsung. Mekanisme pemilihan kepala daerah tidak langsung atau dipilih melalui DPRD sudah pernah diperlakukan di Indonesia pada masa orde baru dan awal reformasi. Memetik pelajaran dari era sebelumnya, salah satu yang digarisnawahi kalangan akademisi adalah pilkada dipilih DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang dan justru berpotensi meningkatkan ruang transaksi yang tidak dapat diawasi oleh masyarakat. Bak istilah 'Tak ada makan siang gratis, dalam Pilkada tak langsung, maka hanya elite penentu suaralah yang menikmati menunya.'

BACA HAL 11...



**HAPPY
NEW YEAR** **2026**

- | | |
|-----------|--|
| 02 | GOVERNMENT TODAY
Pemerintah Buka Keran Impor Gula dan Garam Tahun Depan |
| 04 | NUSANTARA
Indonesia Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan |
| 10 | LISTSTYLE
Igari atau Thai? Dua Tren Makeup Asia yang Sama-sama Segar |

Siaga Letusan Perang Baru di Arab

Serangan udara Arab Saudi menghantam Pelabuhan Mukalla Yaman, menargetkan kapal-kapal dari Uni Emirat Arab (UEA) yang membawa kendaraan lapis baja dan senjata untuk separatis Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA. Ketegangan antara pasukan yang didukung Saudi dan yang didukung UEA meningkat tajam setelah pasukan pro-UEA merebut sebagian besar wilayah timur Yaman, mengabaikan peringatan Saudi dan bahkan peringatan serangan udara baru-baru ini. Dunia bersiaga terhadap letusan perang baru di Timur Tengah. Baca berita lengkap di hal 7. (ist/getty)

Biaya Pilkada Langsung dari Masa ke Masa

2015	Belasan-ratusan miliar per daerah Total: 240 kab/kota + 7 provinsi
2017	Versi Kemendagri: Rp 2,9 triliun Versi pemantau pemilu: hingga Rp 4,2 triliun (101 daerah)
2018	Disepakati: Rp 11,4 triliun Realisasi (Kemenkeu): Rp 18,5 triliun Honor penyelenggara menyerap hingga 60% anggaran
2020 (Pandemi Covid-19)	Awal: Rp 9,9 triliun Akhir: Rp 20,4 triliun (tambahan protokol kesehatan)

2024	Hingga Sept 2024: Rp 37,43 triliun Total ditetapkan: Rp 37,52-38,2 triliun
	Terserap 79,8% untuk KPU, Bawaslu, pengamanan, hingga siber

**LENTERA
MEDIA GROUP**

Diberitahukan kepada pembaca setia, **Kamis (01/01/2026)** Koran Lentera tidak terbit terkait Tahun Baru 2026. Terbit kembali pada **Senin (05/01/2026)**. Update berita bisa terus dinikmati melalui www.lenteratoday.com.

PEMERINTAH BUKA KERAN IMPOR GULA DAN GARAM TAHUN DEPAN

Pemerintah resmi menetapkan kuota impor sejumlah komoditas pangan untuk kebutuhan bahan baku industri pada tahun 2026. Keputusan ini mencakup impor gula, daging lembu, perikanan, hingga garam guna memastikan keberlangsungan rantai pasok industri nasional. Salah satu kuota besar yang ditetapkan adalah gula bahan baku industri sebesar 3,12 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengungkapkan bahwa penetapan ini merupakan hasil rapat koordinasi Neraca Komoditas Pangan 2026 yang melibatkan kementerian teknis terkait.

Salah satu kuota jumbo yang ditetapkan adalah gula bahan baku industri sebesar 3,12 juta ton. Selain itu, pemerintah juga menyepakati gula untuk skema Kemudahan Impor Tujuan Eksport (KITE KB) sebesar 508.360 ton.

"Kami memutuskan untuk memenuhi harapan industri. Kalau untuk konsumsi, hampir semuanya sudah swasembada," ujar Tatang usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Untuk komoditas daging lembu, pemerintah menyetujui impor khusus



(Ilustrasi) Suasana bongkar muat garam impor dari Kapal MV Golden Kiku ke truk pengangkut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. (Dok.ist)

industri sebesar 17.097,95 ton. Angka ini merupakan bagian dari total penetapan kuota impor daging lembu secara keseluruhan yang mencapai 297.097,95 ton.

Di sektor perikanan, Tatang menyebut

pemerintah menetapkan impor bahan baku industri sebesar 23.576,51 ton. Angka ini sejatinya hanya separuh dari usulan awal yang diajukan.

Di luar itu, terdapat bahan baku non-industri yang dikelola

Disiapkan Standar Baru untuk Angkat Kualitas Garam Rakyat

PEMERINTAH bersiap menaikkan kelas garam produksi petambak rakyat agar tidak hanya terserap untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga bisa masuk ke sektor industri. Langkah ini ditempuh dengan menerapkan standar kualitas khusus bagi garam rakyat.

Direktur Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frista Yorhanita mengatakan, standar yang akan diterapkan merujuk pada kelas K1. Untuk itu, KKP telah menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan produksi garam rakyat ke depan.

"K1 itu apa artinya? Minimal dia NaCl nya 94 kemudian dia impuritasnya rendah dan sebagainya. Dengan K1 ini akan lebih memudahkan garam-garam rakyat ini terserap oleh sektor industri. Nah untuk mendukung itu, di tahun 2025 ini tadi kami sudah menyusun SNI dan SNI nanti akan menjadi standar operasi bagi semua petambak dalam memproduksi garam masyarakat," kata Frista dalam konferensi pers di

Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Adapun saat ini, kebutuhan industri menuntut kualitas garam dengan kadar NaCl minimal 97%, lebih tinggi dibandingkan garam konsumsi yang umumnya berada di kisaran 94-97%. Karena itu, KKP berharap upaya peningkatan kualitas yang dilakukan sepanjang 2025 bisa membawa hasil pada musim panen berikutnya.

"Karena industri itu membutuhkan NaCl minimal 97%, nah kami berharap garam yang dihasilkan dari tambak-tambak garam rakyat ini, tidak hanya sekedar memenuhi spek untuk kebutuhan konsumsi saja, tapi juga bisa masuk ke sektor industri," ujarnya.

Seiring target swasembada garam pada 2027, Frista mengakui Indonesia saat ini masih mengandalkan impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Untuk menekan ketergantungan tersebut, KKP menyiapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tambak garam.

Pada 2025, program intensifikasi difokuskan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua. Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan membuka tambak baru di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

"Untuk ekstensifikasi, kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini," kata Frista.

Selain membuka lahan baru, KKP juga mendorong peningkatan produktivitas tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura). Saat ini, rata-rata produksi di wilayah tersebut masih berkisar 100-120 ton per hektare. Pada 2026, produksi ditargetkan naik sekitar 30% menjadi 120-150 ton per hektare. (wid,bis,rls/dya)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 29.225 ton.

Sementara untuk komoditas garam, pemerintah bersikap lebih selektif. Keran impor garam hanya dibuka untuk kebutuhan industri Chlor Alkali Plant (CAP) dengan volume mencapai 1,18 juta ton.

Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kuota impor untuk garam non-CAP, seperti garam pangan dan garam farmasi. Tatang menegaskan, seluruh keputusan volume impor ini berasal dari usulan pelaku usaha yang telah diverifikasi ketat oleh Kemenperin, Kementerian, hingga KKP.

Tatang berharap kebijakan impor yang terukur ini dapat menjaga denyut nadi industri nasional tanpa mengganggu target besar pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. "Semoga keputusan ini bisa memenuhi seluruh harapan industri," pungkasnya.

Beras untuk Industri Disetop

Terpusat, pemerintah memutuskan untuk menyetop impor beras pada 2026. Selain beras umum yang dikonsumsi masyarakat, importasi beras bahan baku untuk industri juga disetop pada 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan selama 2025 ini, kuota impor untuk beras industri telah diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku untuk tepung beras dan bahan. Untuk tahun depan tidak ada lagi impor beras bahan baku industri.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri di 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan.

"Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," tegas Kepala Badan Pangan Nasional itu dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (30/12/2025).

Amran menjelaskan beras bahan baku industri yang dimaksud yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15% dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15% juga.

"Harapannya beras baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan," jelasnya.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi di tahun depan. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton. (wid,ist,ant/dya)

DPR DESAK KEMENKES ANTISIPASI 'SUPER FLU': EVALUASI VAKSIN HINGGA PERKETAT PINTU MASUK RI

Fenomena meningkatnya kasus influenza yang belakangan dikenal sebagai 'super flu' varian Influenza A (H3N2) subclade K mendapat sorotan serius dari DPR RI. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan berbasis data menyusul potensi ancaman varian tersebut terhadap kesehatan masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan sejauh mana vaksin influenza yang selama ini digunakan di Indonesia mampu memberikan perlindungan optimal terhadap varian subclade K. Ia menilai pemerintah tidak boleh berasumsi tanpa kepastian ilmiah, mengingat karakter virus yang terus bermutasi.

Ia menegaskan bahwa Kemenkes memiliki kewajiban untuk memastikan efektivitas vaksin influenza yang saat ini beredar di Tanah Air terhadap varian yang tengah mendominasi kasus di sejumlah negaratersebut.

"Jika vaksin yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap subclade K, kami minta Kemenkes segera melakukan uji ulang, transparan dalam publikasi hasilnya, dan menyusun rencana antisipasi vaksin alternatif yang lebih manjur," ujar Nihayatul Wafiroh, yang akrab disapa Ninik, di Gedung DPR RI, Selasa (30/12/2025).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur III, yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo, itu juga merinci sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan Kemenkes.

Pertama, evaluasi dan uji ulang efektivitas vaksin influenza yang saat ini digunakan terhadap subclade K. Kedua, keterbukaan data hasil uji klinis serta surveilans virus influenza di Indonesia agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

"Dan ketiga, saya minta adanya percepatan pengembangan atau pengadaan vaksin alternatif yang lebih efektif apabila terbukti vaksin yang ada saat ini memiliki efektivitas rendah terhadap varian yang dominan," tegasnya.

Subclade K sendiri diketahui merupakan varian baru dari virus Influenza A (H3N2) yang belakangan mendominasi gelombang kasus flu di sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Meski otoritas kesehatan dunia menyatakan varian ini tidak secara inheren lebih mematikan, tingkat penularannya yang tinggi menyebabkan lonjakan kasus serta meningkatkan tekanan



(Ilustrasi) Calon penumpang Bandara Heathrow, London, Inggris memakai masker untuk melindungi diri dari virus flu.

Photo: Reuters

terhadap fasilitas layanan kesehatan.

Berdasarkan data terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jutaan kasus influenza dilaporkan terjadi di Amerika Serikat pada musim ini, dengan puluhan ribu pasien harus

menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian besar kasus rawat inap tersebut berkaitan dengan H3N2 subclade K.

Sorotan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI lainnya, Yahya Zaini. Ia meminta Kemenkes menyingkatkan

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Larangan Bepergian

PEMERINTAH melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan belum menetapkan kebijakan khusus terkait merebaknya varian influenza 'Super Flu' di Amerika Serikat. Pemerintah saat ini masih mengandalkan langkah pencegahan melalui kegiatan rutin surveilans untuk mengantisipasi potensi wabah atau kejadian luar biasa (KLB).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhamarman, mengatakan hingga kini situasi di Indonesia masih terpantau aman. Oleh karena itu, belum diperlukan kebijakan tambahan di luar mekanisme pengawasan yang telah berjalan.

"Sampai sekarang belum ada kebijakan khusus, kecuali kegiatan rutin surveilans untuk potensi wabah atau KLB," ujar Aji dalam keterangannya, Senin (29/12).

Ia menjelaskan, Kemenkes secara berkala melakukan pemantauan

terhadap penyakit menular, termasuk influenza, melalui laporan dari fasilitas kesehatan dan surveilans di daerah. Seluruh data tersebut dikompilasi dan dianalisis di tingkat pusat.

Selain pemantauan dalam negeri, Kemenkes juga memperhatikan perkembangan situasi kesehatan global, khususnya di negara-negara yang tengah mengalami lonjakan kasus flu seperti Amerika Serikat.

Aji menambahkan, pemerintah memberikan imbauan khusus kepada masyarakat Indonesia yang memiliki rencana perjalanan ke Amerika Serikat. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan mematuhi protokol kesehatan setempat.

"Imbauan kepada masyarakat, jika harus ke wilayah AS agar mematuhi protokol kesehatan di sana untuk mengantisipasi penularan penyakit tersebut," jelasnya.

Langkah ini dinilai penting

kewaspadaan menyusul maraknya laporan penyebaran 'super flu' di Amerika Serikat yang dinilai berpotensi masuk ke Indonesia.

"Kemenkes harus melakukan mitigasi dan surveillance untuk mengetahui apakah 'super flu' sudah masuk ke Indonesia atau belum," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Selasa (30/12/2025). (ist,ini,rls/dya)

CIRI-CIRI KLINIS SUPER FLU (H3N2 SUBCLADE K)

Demam tinggi mendadak

Suhu tubuh dapat meningkat cepat hingga di atas 38-39 derajat Celsius dan sering disertai megigil hebat.

Batuk kering hingga berdahak berat

Batuk berlangsung terus-menerus, pada sebagian kasus berkembang menjadi batuk berdahak kental yang sulit dikeluarkan.

Nyeri tenggorokan parah

Rasa sakit atau perih di tenggorokan terasa lebih intens dibanding flu musiman biasa, terutama saat menelan.

Pilek dan hidung tersumbat

Hidung berair, tersumbat, atau terasa penuh, sering kali disertai bersin berulang.

Nyeri otot dan sendi menyeluruh

Pegal-pegal dirasakan hampir di seluruh tubuh, terutama punggung, pinggang, dan kaki, dengan intensitas lebih berat dari flu biasa.

Sakit kepala berat

Nyeri kepala terasa menusuk atau berdenyut dan dapat berlangsung sepanjang hari.

Kelelahan ekstrem (fatigue)

Tubuh terasa sangat lemas, cepat lelah, dan sulit beraktivitas meski gejala lain mulai mereda.

Sesak napas atau napas terasa berat

Pada sebagian pasien, terutama kelompok rentan, muncul gangguan pernapasan akibat infeksi salur napas bawah.

Mual, muntah, atau diare (lebih sering pada anak-anak)

Gejala saluran cerna bisa muncul, meski tidak selalu terjadi pada orang dewasa.

Durasi sakit lebih lama

Gejala dapat berlangsung 7-14 hari atau lebih, terutama pada pasien dengan daya tahan tubuh rendah.



meningkat mobilitas internasional berpotensi menjadi jalur masuk penyakit menular lintas negara. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan di negara tujuan diharapkan dapat meminimalkan risiko penularan. (wid,ist,rls/dya)

INDONESIA BAKAL SETOP IMPOR SOLAR TAHUN DEPAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menarget untuk dapat menghentikan impor solar pada tahun 2026 seiring kesiapan pengoperasian dari kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Adapun kilang RDMP Balikpapan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp 126 triliun.

Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu investasi terbesar yang dilakukan BUMN guna mengurangi impor BBM. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menuturkan apabila Kilang Balikpapan telah beroperasi penuh, Indonesia akan menghentikan impor solar.

"Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Adapun jika kilang tersebut baru beroperasi secara penuh pada Maret 2026, ia masih membuka kemungkinan impor solar dalam jumlah kecil pada awal 2026.

"Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah," ujarnya.

Penghentian impor solar memang akan tergantung kesiapan kilang



(Ilustrasi) Indonesia bersiap menambah kapasitas pengolahan minyak nasional lewat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Foto: DOK KPI

RDMP Balikpapan. Maka dari itu, Bahlil terus melakukan koordinasi dengan Pertamina terkait kesiapan teknis kilang tersebut.

Saat ini, Kementerian ESDM juga sedang menyiapkan roadmap terkait kualitas solar yang ada di Indonesia. Saat ini solar Indonesia ada pada tingkat kualitas angka setara (Cetane Number) 51, ke depan standar kualitasnya ditarget setara dengan Euro 5.

Meski begitu, Bahlil menyebut masih ada tantangan dari kesiapan infrastruktur yang ada. Walau demikian, ia berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan teknologi agar standar yang ditarget dapat dicapai.

"Upaya kita akan ke sana (Euro 5). Memang sekarang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya memadai untuk itu, tapi upayanya akan kesana (Euro 5), terus kita lakukan yang

Jika Swasta Dilarang, Pakar Ingatkan Risiko Iklim Investasi Terganggu

PENGAMAT menyoroti wacana SPBU swasta wajib membeli solar produksi dalam negeri atau dari PT Pertamina (Persero) berpotensi mengganggu iklim investasi dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Wacana tersebut muncul seiring rencana pemerintah yang bakal menyetop impor solar mulai 2026. Hal ini tak lepas dari kondisi surplus produksi solar dalam negeri yang diperkirakan mencapai 4 juta kiloliter (kl).

Kelebihan solar juga seiring dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan program B50. Oleh karena itu, SPBU swasta harus membeli solar dari Pertamina mulai April 2026. Sebab, RDMP Balikpapan membutuhkan fase persiapan produksi solar selama 3 bulan terhitung sejak saat ini.

Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai wacana pemerintah itu seperti dua mata pisau. Dia bisa menguntungkan dan merugikan.

Menurutnya, keuntungan itu

Ishak mengatakan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka pendek seperti risiko gangguan pasokan solar pada awal 2026 jika RDMP Balikpapan mengalami keterlambatan.

Selain itu, proyeksi surplus itu juga mensyaratkan keberhasilan program mandatory biodiesel 50% atau B50. Jika tidak berjalan mulus maka impor akan tetap diperlukan. "Adapun, kewajiban SPBU swasta menyerap solar hanya dari Pertamina dapat memperkuat monopoli BUMN tersebut sehingga akan mengurangi persaingan pasar," ucap Ishak, Senin (29/12/2025).

Konsekuensinya, kata dia, ada potensi harga jual eceran dapat lebih tinggi jika harga jual produksi domestik lebih tinggi dibandingkan impor. Di satu sisi, Ishak berpendapat jika proyeksi pemerintah tersebut benar, maka kebijakan penghentian impor solar mulai 2026 yang didukung operasional RDMP Balikpapan dan program B50 membawa banyak keuntungan.

Menurutnya, keuntungan itu

seperti penghematan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun karena Indonesia tidak lagi bergantung pada impor 4 juta hingga 5 juta kiloliter solar per tahun. "Hal tersebut selanjutnya akan memperkuat neraca perdagangan dan cadangan devisa," imbuh Ishak.

Dia mengatakan, kondisi tersebut juga akan meningkatkan kemandirian serta ketahanan energi nasional dengan mengurangi risiko fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan geopolitik. Ini dengan catatan bahwa minyak mentahnya berasal dari domestik. "Dampak lainnya, surplus produksi solar domestik hingga 4 juta kl tersebut bisa dialihkan ke produk BBM lain seperti avtur atau bahan bakar diekspor di masa depan," kata Ishak.

Setali tiga uang, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menuturkan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), RI menganut sistem terbuka. Artinya, SPBU swasta juga bagian dari pilar penyangga energi nasional. (Tin,ist,bis/dya)

IMPOR SOLAR RI

JANUARI - OKTOBER 2025

○ Singapura	2,28 Juta Ton
○ Malaysia	940 Ribu Ton
○ Rusia	561 Ribu Ton
○ Korea	81,4 Ribu Ton
○ Mesir	67,2 Ribu Ton
○ India	54,6 Ribu Ton
○ Taiwan	7. 16,7 Ribu Ton
○ Thailand	5,5 Ribu Ton

terbaiknya," ujar Bahlil.

Adapun Bahlil menyebut total kebutuhan solar Indonesia per tahun ada di kisaran 32-33 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih sekitar 15-16 juta ton.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor BBM jenis diesel yang tercatat dalam HS 27101971 atau automotive diesel fuel sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat sebesar 4,01 juta ton.

Apabila dikelompokan berdasarkan negara, impor Solar tercatat paling tinggi berasal dari Singapura sebesar 2,28 juta ton.

Kedua, ditempati oleh Malaysia dengan total impor sebesar 940.000 ton. Ketiga, Rusia sebanyak 560.000 ton.

Keempat, berasal dari Korea Selatan dengan besaran impor 81,4 ribu ton. Kelima, Mesir sebanyak 67,2 ribu ton.

Keenam, berasal dari India sebanyak 54,6 ribu ton. Ketujuh Taiwan, sebanyak 16,7 ribu ton. Kedelapan, berasal dari Thailand sekitar 5,5 ribu ton.

Di sisi lain, impor Solar sejak penerapan mandatori biodiesel ditargetkan terus menurun setiap tahunnya. Kementerian ESDM memproyeksikan impor minyak Solar saat ini sekitar 4,9 juta kiloliter (kl). (wid,blo/ist)

LEMBAGA BARU LAGI: PRABOWO MAU BENTUK BADAN KHUSUS PERUMAHAN

Pemerintah bakal punya satu badan baru lagi. Presiden Prabowo Subianto ingin program pembangunan perumahan yang menjadi janji kampanyenya dilakukan percepatan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembentukan badan atau lembaga baru yang menangani seluruh urusan pembangunan perumahan.

Pemerintah sedang mengkaji badan khusus yang menangani percepatan pembangunan rumah rakyat. Badan khusus sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat program 2 juta renovasi rumah.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ada beberapa kali beliau (Presiden Prabowo Subianto) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya lapor kan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan," tuturnya dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/12/2025).

Fahri menjelaskan lembaga atau badan tersebut nantinya akan menangani segala urusan untuk percepatan pembangunan perumahan, terutama yang menjadi program pemerintah hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lembaga tersebut akan menangani urusan perizinan hingga pembiayaan.

"Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah/pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau (Presiden Prabowo Subianto) membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," terangnya.

Menurutnya selama ini untuk urusan pembangunan perumahan perizinannya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Jika urusan tersebut digabung dalam satu lembaga diyakini akan ada percepatan program pembangunan perumahan.

"Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan," tambahnya.

Fahri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kemensos untuk merealisasikan pendirian lembaga tersebut. Ditargetkan lembaga atau



Wamen PKP, Fahri Hamzah dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).ist

badan tersebut sudah bisa lahir beleid pembentukannya di awal 2026.

"Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita bisa sahkan," tutupnya.

Presiden Prabowo, kata Fahri juga telah menyetujui renovasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah pada tahun depan. Adapun renovasi 1 juta unit rumah di perkotaan akan dipercepat

Keluh Kesah Pengembang Rumah Subsidi

HARGA rumah subsidi tidak akan naik tahun depan. Pengembang perumahan agak cemas karena kemungkinan profit yang didapat akan menipis.

Memang, produksi rumah subsidi akan tetap berjalan dan stok akan terjaga. Terlebih lagi jika ada pembiayaan dari perbankan, pembangunan rumah subsidi akan tetap lanjut. Hanya saja, harga material yang meningkat bisa menjadi faktor menurunnya pendapatan.

"Imbasnya profit pengembang turun terkait adanya kenaikan biaya produksi rumah dan infrastrukturnya," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Dddy Indra Setiawan, Selasa (30/12/2025).

Kenaikan harga material ini sempat terlihat salah satunya di Cilegon, Banten. Beberapa waktu lalu Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad atau yang kerap disapa Andre Bangsawan mengakui di sana terjadi kelangkaan bahan dasar material seperti batu dan pasir akibat dari penutupan

sementara tambang yang ada di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang berimbas pada melonjaknya harga material.

Ia mencontohkan harga 1 rit pasir untuk fondasi dari harga Rp 800 ribu menjadi Rp 900 ribu, pasir cor dari harga Rp 1 juta maupun harga batu per truk dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1 juta.

Walau demikian, secara nasional, ia masih bisa terima jika tidak ada penyesuaian harga rumah subsidi. Hanya saja, ia berharap pemerintah bisa membantu mencari solusi apabila harga material naik sementara harga rumah subsidi masih sama.

"Namun yang perlu kita pikirkan bersama termasuk pemerintah, apabila rumah harganya tetap tapi material yang kita pakai melonjak itu harus dicari solusi," katanya.

Harga rumah subsidi yang masih berlaku akan sama seperti pada tahun 2024. Harga batas maksimal rumah subsidi tahun 2024 sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan

"Untuk renovasi, tidak ada masalah tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan. Karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," kata Fahri.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo optimis banyak capaian baru di tahun 2026. Sejumlah program unggulan diantaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka banyak lapangan kerja dan renovasi rumah.

"Beliau sangat optimis bahwa nanti 2026, 2027 akan banyak capaian-capaihan baru. Mudah-mudahan bisa mengubah lanskap sosial ekonomi Indonesia secara sangat menyeluruh karena Pak Presiden memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan," kata Qodari. (gus,ant,rri/dya)

Rincian Harga Batas Maksimal Rumah Subsidi

1. Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) sebesar Rp 166 juta.

2. Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) sebesar Rp 182 juta.

3. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 173 juta

4. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 185 juta.

5. Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan sebesar Rp 240 juta.



Perumahan Rakyat (PUR) sebelumnya juga resmi menerapkan aturan baru terkait batas maksimal penghasilan calon penerima rumah subsidi. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (wid,rls/dya)

Baru 1 Dapur MBG di Kota Batu Mengantongi Sertifikat Higiene

BATU - Hingga akhir Desember 2025, baru satu dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ketatnya uji laboratorium hingga pemenuhan standar penjamah makanan menjadi tantangan utama yang membuat belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya belum lolos sertifikasi.

"Memang baru satu dapur yang lolos. Tetapi kamiberharap ini bisa menjadi motivasi bagi dapur-dapur lain agar lebih siap dalam memenuhi standar yang ditetapkan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, Aditya Prasaja, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Disebutkannya, satu-satunya dapur MBG yang telah mengantongi SLHS tersebut adalah SPPG Sulaiman Al Haj yang berlokasi di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo.

Berrdasarkan data Dinkes Kota Batu, dari total 19 dapur SPPG yang ada, sebanyak 6 dapur diketahui belum beroperasi. Dengan demikian, hanya 13 dapur yang aktif, namun sebagian besar masih belum memenuhi standar minimal penerbitan SLHS.

Di sisi lain, Tenaga Sanitasi

Lingkungan Ahli Muda Dinkes Kota Batu, Esty Setya Windari, menjelaskan proses penerbitan SLHS memang dirancang melalui tahapan yang ketat dan berlapis. Setiap dapur wajib menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) serta uji laboratorium sebelum dinyatakan layak.

"Pemeriksaan meliputi sampel makanan, peralatan masak, kualitas air bersih, hingga pemeriksaan kesehatan penjamah makanan. Semua tahapan itu harus dilalui agar hasil penilaian benar-benar kredibel," jelas Esty.

Selain uji laboratorium, pemenuhan standar penjamah makanan juga menjadi salah satu tantangan utama. Disebutkannya, para penjamah diwajibkan mengantongi sertifikat resmi sesuai ketentuan sebagai bentuk jaminan keamanan pangan dalam proses pengolahan makanan.

"Dalam asesmen awal, mayoritas dapur SPPG belum mampu mencapai nilai ambang batas minimal 80. Akibatnya, proses sertifikasi harus diulang dari awal sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, Esty juga mengungkapkan kendala lain yang turut



Tim Teknis SLHS Kota Batu melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dadaprejo. (dok. Dinkesbatu)

memperlambat proses sertifikasi, yakni lamanya waktu uji laboratorium. Seluruh sampel dari dapur SPPG di Kota Batu harus dikirim ke laboratorium di Kabupaten Malang, yang juga melayani ratusan dapur SPPG dari wilayah lain.

"Antrean sampel cukup panjang. Ini otomatis membuat waktu tunggu menjadi lebih lama," ungkap Esty.

Meski demikian, Esty menegaskan cepat atau lambatnya terbit sertifikat SLHS sangat bergantung pada kesiapan masing-masing dapur, baik

dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar teknis yang dipersyaratkan.

Dinkes Kota Batu, lanjut dia, terus melakukan pendampingan dan percepatan kepada seluruh dapur SPPG. Namun demikian, seluruh tahapan tetap harus dijalankan sesuai prosedur dan tidak bisa dipangkas.

"Kami terus mengakselerasi pendampingan, tapi tahapan tidak bisa dipotong. Ini menyangkut keamanan pangan," tegasnya. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Upayakan Perpanjangan Pinjam Pakai Lahan UM untuk 3 Sekolah



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

"Yang jelas kami sudah berbicara dengan rektor dan wakil rektor UM. Bawa terkait dengan dua SD dan SMPN 4 Kota Malang, itu kami mendapat lampu hijau untuk memperpanjang masa pinjam," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, Pemkot Malang telah menindaklanjuti komunikasi tersebut dengan langkah administratif berupa pengiriman surat resmi kepada pihak UM. Selanjutnya, persoalan ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam forum rapat bersama untuk menemukan solusi terbaik.

"Kami sudah bersurat. Nanti dirapatkan itu, dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kami mendapatkan satu solusi," jelasnya.

Dalam kesempatannya ini, Wahyu juga menyunggingkan relokasi sekolah

bukanlah perkara mudah dan memiliki dampak besar, khususnya bagi peserta didik. Terlebih, sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang masih menggunakan skema radius, yang menempatkan kedekatan domisili sebagai faktor utama.

"Nah mayoritas peserta didik di tiga sekolah ini zonanya berdekatan dengan rumah tinggal," ungkapnya.

Jika sekolah harus dipindahkan ke lokasi lain, lanjut Wahyu, hal tersebut dikawatirkan justru merugikan siswa dan orang tua. Akses pendidikan yang selama ini dekat dengan tempat tinggal bisa menjadi lebih sulit dan berpotensi menurunkan kenyamanan serta efektivitas belajar.

"Semoga pihak UM juga bisa memahami. Kami sudah bersurat untuk memperpanjang masa pinjam," tegasnya. Saat ditanya mengenai potensi kendala dalam proses perpanjangan tersebut, Wahyu memastikan hingga saat ini tidak ada persoalan berarti. Menurutnya, proses masih berjalan dan mengarah pada solusi yang positif.

Senada dengan Wali Kota Malang,

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim, turut memastikan perpanjangan masa pinjam pakai lahan tersebut tengah diupayakan.

Disebutkannya, komunikasi antara Pemkot Malang dan pihak UM telah dilakukan secara intens. Hasil pembicaraan tersebut mengarah pada kesepakatan untuk memperpanjang masa pinjam pakai.

"Itu sudah ada pembicaraan bersama Pak Wali Kota, insyaallah diperpanjang," tambahnya.

Disinggung terkait durasi perpanjangan, Adhim menjelaskan teknis dan jangka waktu nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama baru. "Nanti ada MoU lagi," katanya singkat.

Untuk diketahui, selama ini, ketiga sekolah tersebut berdiri di atas lahan yang merupakan aset milik Universitas Negeri Malang. Masa pinjam pakai lahan tersebut diketahui akan berakhir pada Februari 2026 mendatang. (Santi/Dya)

UEA-SAUDI IKUT CAMPUR, YAMAN UMUMKAN STATUS DARURAT

Situasi Yaman kian mencekam setelah pemerintah yang diakui internasional mengambil langkah penting menyusul perebutan wilayah oleh kelompok separatis di selatan negara itu. Pemerintah Yaman menetapkan status darurat nasional dan membatalkan kerjasama keamanan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di tengah eskalasi konflik separatis, pada Selasa (30/12/2025). Situasi ini turut menyeret Arab Saudi dan UEA dalam seteru di negara yang telah lama dilanda perang tersebut.

Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, pada Selasa (30/12/2025) mengumumkan status darurat nasional sekaligus membatalkan perjanjian keamanan dengan Uni Emirat Arab (UEA).

"Perjanjian Pertahanan Bersama dengan Uni Emirat Arab dengan ini dibatalkan," demikian bunyi pernyataan tersebut, dilansir AFP, Selasa (30/12/2025).

Keputusan tersebut disertai dekret terpisah yang menetapkan status darurat selama 90 hari, termasuk penerapan blokade udara, laut, dan darat selama 72 jam.

Langkah tegas Alimi diambil setelah koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam konflik Yaman mengumumkan telah menyerang pengiriman senjata dari UEA yang ditujukan bagi kelompok



Keadaan di Mukalla tampak deretan kendaraan militer rusak setelah serangan udara koalisi pimpinan Saudi. (Getty Images)

separatis di selatan. Insiden itu memperjelas keretakan serius di dalam koalisi negara-negara Teluk yang sebelumnya berada di pihak yang sama dalam konflik Yaman.

Kelompok separatis Dewan Transisi Selatan atau Southern

Transitional Council (STC), yang didukung Abu Dhabi, dilaporkan telah melancarkan operasi militer besar-besaran sepanjang bulan ini. Pasukan STC bergerak cepat di wilayah selatan Yaman dan berhasil menguasai sebagian besar Provinsi

TIMELINE KONFLIK DI YAMAN YANG MELIBATKAN ARAB SAUDI DAN UNI EMIRAT ARAB (UEA)

Fase Awal (2014-2015): Eskalasi dan Intervensi

- Sep 2014: Houthi kuasai Sanaa; Presiden Hadi melarikan diri ke Aden.
- Mar 2015: Saudi-UEA memimpin intervensi militer melawan Houthi.

Fase Konflik Panjang dan Perpecahan Internal (2016-2022)

- 2019: Retak koalisi; UEA dukung STC kuasai Aden, Saudi tetap dukung pemerintah Hadi.
- Mar 2022: Penghentian permusuhan untuk proses politik PBB-Oman.

Fase Ketegangan Baru dan Rivalitas (2024-2025)

- Jan-Mei 2024/2025: AS-Ingris serang Houthi terkait krisis Laut Merah.
- Mei 2025: Upaya gencatan senjata konflik regional.
- Des 2025: STC (pro-UEA) kuasai wilayah strategis Hadhramaut; bentrok dengan kubu pro-Saudi.
- 30 Des 2025: Pemerintah Yaman putus kerja sama militer dengan UEA dan tetapkan status darurat nasional.



Hadramawt yang kaya sumber daya, serta wilayah luas di provinsi tetangganya, Mahrah.

Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Alimi memerintahkan pasukan STC untuk segera menyerahkan wilayah yang mereka kuasai kepada pasukan yang didukung Arab Saudi. Ia menyebut pergerakan separatis itu sebagai sebuah "pemberontakan yang tidak dapat diterima," sekaligus memperingatkan bahwa langkah tersebut mengancam keutuhan negara.

Konfrontasi antara pemerintah Yaman dan STC ini berisiko semakin memecah belah pemerintahan yang sejak awal telah rapuh dan terfragmentasi. Di dalam tubuh pemerintah sendiri terdapat faksi-faksi yang didukung oleh kekuatan Teluk berbeda, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara kaya minyak yang memiliki kepentingan strategis masing-masing di Yaman.

Eskalasi terbaru ini juga mengancam proses perundingan damai yang selama ini berjalan lambat dengan kelompok Houthi yang didukung Iran. Kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa pada 2014 dan menggulingkan pemerintahan Yaman, sebuah peristiwa yang memicu intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi.(rtr,ist/dya)

Diberi Waktu 24 Jam Tarik Keluar Pasukan

ARAB Saudi meminta Uni Emirat Arab (UEA) menanggapi secara positif desakan Yaman untuk menarik pasukan Emirat dari wilayah Yaman dalam waktu 24 jam.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (30/12/2025) seperti dilansir Anadolu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Saudi menyatakan kekecewaannya atas "tindakan yang dilakukan negara sahabat Uni Emirat Arab" yang mendorong pasukan Dewan Transisi Selatan (STC) untuk melancarkan operasi militer di Hadhramaut dan Al-Mahra.

Pemerintah Saudi menyebut langkah UEA itu sebagai "ancaman terhadap keamanan nasional Kerajaan serta keamanan dan stabilitas" Yaman, menurut pernyataan tersebut.

"Kerajaan menegaskan pentingnya Uni Emirat Arab sebagai negara sahabat untuk menerima permintaan Republik Yaman agar seluruh pasukannya meninggalkan Republik Yaman dalam waktu dua puluh empat jam, serta menghentikan segala bentuk dukungan militer maupun keuangan kepada pihak mana pun di Yaman," kata Kemlu Saudi.

Arab Saudi juga menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya merupakan batas yang tidak boleh dilanggar dan "Kerajaan tidak akan ragu mengambil seluruh langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi serta menetralkan ancaman tersebut."

Sebelumnya pada hari yang sama, Yaman mengumumkan pembatalan kerja sama pertahanan dengan UEA dan meminta UEA segera menarik seluruh pasukannya dari wilayah Yaman dalam waktu 24 jam.

Kantor berita SPA sebelumnya melaporkan bahwa koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap Pelabuhan Al Mukalla di Yaman timur yang menargetkan senjata dan peralatan militer yang diturunkan dari dua kapal yang tiba dari UEA.

Serangan itu kemungkinan menargetkan sebuah kapal yang diidentifikasi oleh analis sebagai Greenland, sebuah kapal roll-on, roll-off yang berbendera St. Kitts. Data pelacakan yang dianalisis oleh AP seperti dilansir France 24 menunjukkan kapal itu berada di

Fujairah pada 22 Desember dan tiba di Mukalla pada Ahad. Kapal kedua tidak dapat segera diidentifikasi.

Mohammed al-Basha, seorang ahli Yaman dan pendiri Basha Report, sebuah perusahaan penasihat risiko, mengutip video media sosial yang dianggap menunjukkan kendaraan lapis baja baru yang melintas di Mukalla setelah kedatangan kapal tersebut. Pemilik kapal, yang berbasis di Dubai, tidak dapat dihubungi segera.

"Saya memperkirakan eskalasi yang terukur dari kedua belah pihak. Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA kemungkinan akan merespons dengan memperkuat kendali," kata al-Basha. "Pada saat yang sama, aliran senjata dari UEA ke STC akan dibatasi setelah serangan pelabuhan, terutama karena Arab Saudi mengendalikan wilayah udara."

Rekaman yang kemudian ditayangkan oleh televisi pemerintah Saudi, yang tampaknya difilmkan oleh pesawat pengintai, dianggap menunjukkan kendaraan lapis baja bergerak melalui Mukalla menuju area persiapan. Jenis kendaraan tersebut sesuai dengan rekaman di media sosial.(rtr,ist/dya)

RISET: DALAM 3 MENIT, 99 PERSEN BAKTERI DI TALENAN KAYU MATI

Beberapa orang meragukan fungsi talenan kayu ini karena dinilai lebih mudah rusak, menghitam, berjamur, hingga lembap dan menyebabkan kontaminasi silang akibat bakteri yang berkembang biak di dalamnya. Benarkah demikian?

Talenan menjadi salah satu peralatan dapur yang wajib kita punya di rumah. Papan untuk memotong bahan-bahan ini memang tersedia dalam berbagai jenis bahan, namun salah satu yang paling populer digunakan andalan talenan kayu.

Dilansir website resmi IPB, Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University, Harum Fadhilatunnur, STP, MSc, menjelaskan talenan kayu dan plastik dapat menyerap sisa makanan dan air sehingga menciptakan lingkungan lembap yang menjadi "rumah" ideal bagi mikroba patogen seperti kapang atau bakteri untuk berkembang.

"Jika mikroba patogen, misalnya *Salmonella*, *E. coli*, atau *Listeria monocytogenes*, tumbuh di talenan dan mencemari makanan, maka berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, mulai dari yang sifatnya jangka pendek seperti diare maupun jangka panjang akibat akumulasi mikotoksin," jelasnya.

Kendati demikian, menurut penelitian dua ahli mikrobiologi pangan, Dean O. Cliver dan Nicky Lin dari University of Wisconsin menemukan bahwa bakteri pada talenan kayu akan mati hanya dalam waktu 3 menit. Sementara, bakteri pada talenan plastik mampu bertahan hidup lebih lama dan bahkan dapat berkembang biak.

Dalam risetnya, kedua ahli ini menguji talenan kayu dan plastik dengan menempatkan bakteri *Salmonella*, *Listeria*, dan *E. coli*. Ketiganya adalah bakteri penyebab keracunan makanan yang umum ditemukan pada daging mentah, sayuran terkontaminasi, dan bahan makanan lainnya.

Hasilnya, bakteri-bakteri tersebut hanya dapat bertahan hidup tidak lebih dari tiga menit. Consumers' Association of Penang menjelaskan lebih lanjut, pada talenan kayu, terutama berbahan kayu maple memiliki struktur berpori yang menyerap bakteri di bawah permukaan, memutus akses bakteri terhadap oksigen dan kelembapan. Setelah terperangkap, bakteri mulai mati dengan cepat.

Sebaliknya, pada talenan plastik yang telah tergores pisau dapat memerangkap kelembapan dan sisa bahan makanan sehingga menciptakan tempat ideal untuk bakteri berkembang biak. Bahkan setelah dibersihkan, goresan pada talenan plastik dapat menjadi tempat bakteri bersembunyi,

bertahan hidup, dan bahkan berkembang biak meskipun sudah dibersihkan menggunakan sabun dan spons.

Maka itu, Harum menyarankan, sebaiknya gunakan talenan berbahan stainless steel karena tidak menyerap air sehingga bebas lembap dan minim risiko kontaminasi silang akibat bakteri.

Selain itu, ia juga menyarankan sebaiknya peralatan dapur satu ini langsung dicuci dengan air sabun dan air panas, lalu dikeringkan. Proses sanitasi dengan disinfektan seperti klorin, juga dapat dilakukan secara berkala.

Kemudian, Harum juga mengatakan, "Penggunaan talenan perlu dibedakan antara talenan khusus bahan mentah seperti daging dan ikan, dan talenan khusus bahan matang atau siap saji seperti buah dan sayur, untuk mencegah kontaminasi silang. Kita bisa gunakan bentuk atau warna talenan yang berbeda untuk masing-masing talenan agar mudah mengingatnya," imbuhnya.

Perlukah Direbus?

Talenan, sendok, mangkuk atau spatula kayu memang aman digunakan, tapi membersihkannya kadang jadi tantangan tersendiri. Ya, kayu memang mudah menyerap air, sehingga jika tidak dirawat dengan benar bisa berjamur dan cepat rusak. Mungkin kamu pernah mendengar untuk merebus peralatan dapur yang terbuat kayu agar lebih bersih. Katanya, cara ini bisa mengeluarkan kotoran dan sisa masakan yang menempel di serat kayu. Tapi, benarkah cara tersebut aman dilakukan?

Dikutip dari Better Homes & Gardens, merebus memang bisa membantu mengeluarkan kotoran dan bau menyengat dari peralatan kayu. Namun, jika dilakukan terlalu sering, air mendidih justru bisa merusak serat kayu, membuatnya melengkung, atau kehilangan minyak alaminya. Oleh karena itu, metode merebus ini sebaiknya dilakukan hanya sesekali, misalnya sebulan sekali tergantung seberapa sering kamu

menggunakan peralatan kayumu.

Jika ingin hasil lebih maksimal, Jo Hadlow-Davies dari Edge Handcrafted Tables and Furniture juga menyarankan trik sederhana, yaitu menggosokkan sepotong lemon pada talenan yang dipakai untuk bawang atau bahan beraroma tajam. Cara ini efektif menghilangkan bau sebelum dicuci.

Selain itu, simpanlah peralatan kayu dengan benar. Talenan sebaiknya diletakkan berdiri di sisi panjangnya agar tidak melengkung, sementara sendok dan spatula bisa ditaruh tegak di wadah supaya cepat kering. Pastikan juga tidak ada bagian yang terendam air.

Cara Merawat Peralatan Kayu agar Lebih Awet

Peralatan kayu bisa terlihat kusam atau berbulu setelah lama dipakai, bahkan kadang serat kayunya bisa tersangkut di kain lap. Saat itu terjadi, atau sebelum sampai terjadi, oleskan perawatan untuk menutrisi dan melindungi kayu.

Pastikan minyak atau pelapis yang digunakan aman untuk makanan dan tidak mengubah rasa. "Anda bisa menggunakan minyak zaitun sesekali, tapi hanya untuk peralatan yang dipakai dan dicuci setiap hari," kata Hadlow-Davies. Kalau tidak, kayu bisa

menjadi tengik. Tidak semua peralatan kayu bisa diselamatkan dengan perawatan. Jika sudah ada retakan, belahan, atau bentuknya melengkung parah, sebaiknya ganti dengan yang baru. Sebab, retakan bisa menyimpan kotoran dan bakteri yang sulit dibersihkan, sehingga berisiko bagi kesehatan. (wid,kum,ist/dya)

Kesalahan dalam Perawatan dan Penggunaan

1. Tidak mengoleskan minyak mineral
2. Memilih produk yang salah untuk melindungi talenan
3. Menempatkan talenan di mesin pencuci piring
4. Atasi Bau Asam



Sempat Dianggap Punah 3 Dekade, Kucing Kepala Datar Muncul Lagi di Thailand



Setelah hampir tiga dekade tak terdokumentasi, kucing kepala datar atau kucing tandang (*Prionailurus planiceps*), salah satu spesies kucing paling langka di dunia, akhirnya kembali muncul di Thailand. Temuan ini menjadi kabar menggembirakan bagi dunia konservasi, mengingat spesies tersebut sempat dikategorikan sebagai "mungkin punah" di negara tersebut.

Kucing kepala datar terakhir kali tercatat secara resmi di Thailand pada tahun 1995. Sejak itu, keberadaannya menjadi misteri besar bagi para ilmuwan. Minimnya bukti visual selama puluhan tahun membuat banyak pihak meragukan apakah spesies ini masih bertahan hidup di alam liar. Meski demikian, laporan-lisan dari masyarakat lokal terus bermunculan dan mendorong para aktivis konservasi untuk tetap

melakukan pencarian. Upaya panjang tersebut akhirnya membawa hasil. Tim dari Departemen Taman Nasional, Satwa Liar, dan Konservasi Tanaman (DNP) Thailand, bekerja sama dengan organisasi konservasi Panthera, berhasil merekam keberadaan kucing kepala datar menggunakan kamera jebakan (camera traps).

Sepanjang tahun 2024, tim mencatat sebanyak 13 kali deteksi. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 dengan tambahan 16 deteksi baru. Temuan paling emosional adalah tertangkapnya gambar seekor induk kucing kepala datar bersama anaknya. Bukti ini menunjukkan bahwa spesies langka tersebut tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga masih berkembang

biak di alam liar. "Ini adalah momen bersejarah bagi Thailand dan refleksi kuat dari komitmen jangka panjang kami terhadap konservasi," ujar Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Thailand, Suchart Chomklai, seperti dikutip dari IFL Science. Ia menambahkan bahwa kemunculan kembali kucing kepala datar menjadi pengingat penting bahwa melindungi habitat alami sama dengan menjaga masa depan bangsa.

Strategi Baru di Balik Penemuan

Kucing kepala datar dikenal sebagai hewan nokturnal yang sangat pemalu dan cenderung bersembunyi di habitat dengan vegetasi rapat. Karakter ini membuat pencarian mereka menjadi tantangan besar bagi para peneliti.

Rattapan Pattanarangsang, Manajer Program Konservasi *Panthera Thailand*, mengungkapkan bahwa kegagalan upaya sebelumnya disebabkan oleh penempatan kamera jebakan yang kurang tepat. Tim kemudian mengubah strategi dengan memanfaatkan pengalaman dari penelitian kucing bakau (fishing cat).

Faktor kuncinya adalah pilihan lokasi penempatan. Dengan memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun dari penelitian kucing bakau, para peneliti *Panthera* mampu mengidentifikasi lokasi yang cocok, yang akhirnya membuatkan keberhasilan deteksi," jelas Rattapan.

Harapan Baru bagi Spesies Terancam

Secara global, populasi kucing kepala datar diperkirakan hanya

tersisa sekitar 2.500 ekor dan berstatus terancam punah dalam Daftar Merah IUCN. Di Thailand, spesies ini sebelumnya bahkan diklasifikasikan sebagai "mungkin punah".

Keberhasilan pendekatan ulang ini membangkitkan optimisme baru. Para peneliti berharap temuan ini dapat menjadi titik awal untuk menyelidiki kembali laporan-laporan tak terkonfirmasi mengenai spesies langka lain di wilayah yang belum banyak dijelajahi. Kesuksesan ini juga memperkuat pesan bahwa konservasi jangka panjang dapat memberikan hasil nyata bagi kelestarian keanekaragaman hayati. (tmo,ist/dya)

menjawab kebutuhan pengguna di era identitas digital yang terus berkembang. (kcm,ist/dya)

Fakta Ilmiah Kucing Kepala Datar

Nama Ilmiah:
Prionailurus planiceps.

Klasifikasi:
Bagian dari genus *Prionailurus*, berkerabat dekat dengan Kucing Bakau (*P. viverrinus*).

Ciri Fisik:
Kepala datar, tubuh ramping (seukuran kucing rumahan), kaki berselaput, dan ekor pendek.

Adaptasi :
Mata menghadap lebih ke depan untuk melihat mangsa di air, kaki berselaput untuk berenang.

Habitat :
Lahan basah hutan hujan tropis dataran rendah dekat sumber air besar di Sumatra, Kalimantan.



**HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO-SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGALEK:** TINA W I NGAWI | **DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap berita dilengkapi dengan tanda pengenal kewarawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewarawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Igari atau Thai? Dua Tren Makeup Asia yang Sama-sama Segar

Di tengah derasnya arus tren kecantikan global, Asia kembali menunjukkan pengaruh kuatnya. Kali ini lewat dua gaya riasan yang ramai dibicarakan di media sosial yaitu Igari makeup look dari Jepang dan Thai makeup look yang terinspirasi dari pesona selebritas Thailand. Sekilas, keduanya sama-sama menawarkan tampilan segar dan natural. Namun jika ditelisik lebih dalam, karakter visual yang dihadirkan justru bertolak belakang.

Perbedaan dua gaya ini tak hanya soal warna, tetapi juga tentang emosi, teknik, dan cara membaca struktur wajah. Hal ini diungkapkan Professional Makeup Artist Sissy Sosro.

"Sekarang orang sudah makin sadar soal makeup placement dan karakter wajah. Jadi bukan cuma ikut tren, tapi tahu kenapa sebuah look cocok atau tidak," ujar Sissy. Igari makeup bukan sekadar riasan. Ia adalah ekspresi. Lahir dari kreativitas makeup artist Jepang Igari Shinobu, gaya ini dikenal dengan ciri khas wajah yang tampak seperti baru saja menangis, namun tetap manis.

"Makeup Igari itu terlihat seperti habis nangis, matanya sembab tapi cantik," kata Sissy. Kunci utama Igari terletak pada penempatan blush on yang tidak lazim. Jika riasan klasik menempatkan blush di tulang pipi, Igari justru mendekatkannya ke area mata dan hidung.

"Blush on diletakkan di dekat mata, lalu sedikit di hidung. Efeknya seperti wajah yang kemerahan karena emosi atau udara dingin," jelasnya. Hasilnya adalah rona lembut yang memberi ilusi wajah lebih muda, segar, dan effortless. Warna merah muda atau peach yang mendominasi menciptakan kesan

youthful dan sedikit playful, seolah menampilkan sisi rapuh namun memikat. Igari cocok bagi mereka yang ingin tampil imut, ekspresif, dan tidak terlalu "rapi", karena justru ketidaksempurnaannya itulah daya tarik utama gaya ini.

Jika Igari bermula pada emosi, Thai makeup look justru menonjolkan ketenangan. Terinspirasi dari tampilan selebritas Thailand, gaya ini identik dengan kulit yang tampak sehat, bersih, dan nyaris tanpa cela. "Thai makeup itu kuncinya di blending yang sangat halus. Hasilnya seperti no makeup-makeup look," ujar Sissy.

Tidak ada garis tegas atau kontras mencolok. Semua elemen, blush, eyeshadow, hingga lipstik, dibuat senada dan menyatu. "Biasanya warnanya peachy semua. Jadi dari mata, pipi, sampai bibir nyambung dan tidak harsh," tambahnya.

Teknik ini menghasilkan tampilan kulit yang flawless, mulus, namun tetap ringan. Karena pengaplikasianya tipis, Thai makeup look sangat cocok untuk aktivitas harian, mulai dari kuliah, bekerja, hingga acara kasual semi-formal. Praktis, tahan lama, dan nyaman, tak heran gaya ini digemari oleh mereka yang ingin tampil rapi tanpa terlihat berlebihan.

Meski berbeda karakter, Igari dan Thai makeup look memiliki benang merah yang sama: menonjolkan kecantikan alami dengan pendekatan lembut. Bedanya, Igari lebih emosional dan ekspresif, sementara Thai lebih terkontrol dan polished.

Pilihan gaya pun kembali pada kepribadian dan kebutuhan. Ingin tampil manis dengan sentuhan dramatis? Igari bisa jadi jawaban. Menginginkan wajah segar yang nyaris tanpa makeup? Thai look lebih pas.



Cara Aplikasi Igari Makeup Look

Tren Igari Makeup yang berasal dari Jepang ini seringkali ditiru oleh banyak beauty creator dari berbagai negara. Makeup look tersebut memperlihatkan tampilan yang lembut dengan pipi yang merona merah, menyerupai efek orang yang sedang minum atau mabuk ringan. Tujuan dari makeup look ini adalah untuk menciptakan kulit yang lembut dan lembab dengan fokus pada pipi, sambil menjaga bagian wajah lainnya tetap terlihat sederhana. Simak yuk cara-cara berikut ini!

Bersihkan Kulit

Bersihkanlah wajah kalian dengan lembut menggunakan sabun wajah yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing.

Oleskan Maskara Pada Bulu Mata

Aplikasikan maskara secara tipis dengan melingkari bulu mata dari akar hingga ujung untuk menciptakan tampilan yang natural dan lentik. Kalian bisa menggunakan Soulyu Anti-Drop Mascara sebagai pilihan untuk bulu mata yang tahan air.

Oleskan Pelembab atau Primer

Sebelum mulai menggunakan makeup, oleskanlah pelembab atau primer secara merata pada wajah kalian. Hal ini akan membantu menjaga kelembaban kulit dan membuat tampilan riasan lebih awet dan merata.

Ratakan Kulit dengan Foundation atau CC Cream

Gunakan foundation atau CC cream untuk meratakan warna kulit kalian. Dengan menggunakan CC Cream seperti Soulyu Skin Glow CC Cream, kalian akan mendapatkan hasil Igari Makeup yang lebih natural.

Oleskan Blush On

Gunakan blush on (disarankan menggunakan cream atau cair) dengan warna lembut dan kemerahan, lalu aplikasikan pada bagian atas pipi kalian, ratakan ke arah pelipis.

Contour Ringan dengan Bronzer

Aplikasikan contour sedikit wajah kalian menggunakan bronzer matte atau powder contour, dengan fokus pada cekungan pipi, garis rahang, dan pelipis.

Aplikasikan Eyeshadow Netral

Aplikasikan eyeshadow berwarna netral untuk menyempurnakan bentuk mata alami kalian, menjaga tampilan tetap lembut dan halus.

Garis Mata Tipis-Tipis dengan Eyeliner

Lapisi mata kalian dengan garis tipis eyeliner di dekat garis bulu mata. Menggunakan Precision Pro Matte Eyeliner dari Soulyu merupakan pilihan yang tepat karena kalian dapat memiliki tampilan eye look Igari yang tidak akan luntur.

Oleskan Maskara Pada Bulu Mata

Aplikasikan maskara secara tipis dengan melingkari bulu mata dari akar hingga ujung untuk menciptakan tampilan yang natural dan lentik. Kalian bisa menggunakan Soulyu Anti-Drop Mascara sebagai pilihan untuk bulu mata yang tahan air.

Aplikasikan Lip Cream dan Lip Gloss Tipis

Lengkapi penampilan kalian dengan mengaplikasikan lip cream dan lip gloss tipis untuk memberikan tampilan bibir natural yang berkilau dan berwarna merata. Kalian bisa menggunakan Lip Maximizer dari Soulyu yang mencakup lip cream dan lip gloss untuk menciptakan tampilan bibir natural yang lebih penuh dan berwarna merata.

Akhiri dengan Face Mist atau Setting Spray

Jangan lupa untuk menggunakan face mist atau setting spray agar makeup kalian tetap awet sehari-hari. Gunakan face mist yang mengandung skincare di dalamnya seperti Soulyu Miracle Serum Mist agar kulit kalian tetap terawat. (Ist/dya)

Make Up Thailand Look

1. Rias Mata dengan Pilihan Warna yang Segar
2. Baurkan Blush di Pipi dan Hidung
3. Jangan Lupakan Highlighter
4. Oles Bibir dengan Produk Glossy

Pilkada Lewat DPRD ...dari hal 1

Ketua Fraksi NasDem DPR RI Viktor Laiskodat mengatakan, Pilkada melalui DPRD tetap konstitusional dan selaras dengan Undang-undang Dasar NRI 1945, serta Pancasila.

Menurutnya, konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah. Sehingga, mekanisme Pilkada melalui DPRD bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi," ujarnya, Selasa (30/12/2025), di Jakarta.

Perubahan mekanisme Pilkada, lanjut Viktor, tidak bertujuan mematikan demokrasi. Tapi, untuk menjamin demokrasi berjalan sehat, bukan cuma ritual elektoral lima tahunan.

"Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat," imbuhnya.

Dia menambahkan, berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah semestinya menjadi refleksi.

Tuntutan integritas personal kepala daerah, kata Viktor, harus diiringi dengan pemberahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," tandasnya.

Sekadar informasi, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD belakangan santer disampaikan sejumlah pimpinan partai politik.

Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terang-terangan menginginkan Pilkada lewat DPRD, bukan langsung oleh rakyat seperti yang berlaku sekarang.

Sebenarnya, ide pilkada tidak langsung bukanlah hal baru dalam diskursus politik nasional. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhammin Iskandar lebih dahulu melemparkan gagasan agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Usulan tersebut dilatarbelakangi keprihatinan atas tingginya ongkos politik serta praktik uang yang terus

membayangi pilkada langsung.

Beberapa bulan kemudian, wacana serupa kembali mendapat panggung. Pada 5 Desember 2025, dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka menyampaikan usulan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan itu langsung mendapat respons positif dari Presiden Prabowo. Sikap tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa gagasan pilkada tidak langsung kembali memperoleh momentum, terutama di tengah pembahasan RUU Pemilu yang tengah bergulir.

Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo, bahkan telah secara resmi menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Menurut Gerindra, pelaksanaan pilkada melalui DPRD dinilai lebih efisien dari berbagai aspek, mulai dari tahapan penjaringan calon, mekanisme pemilihan, alokasi anggaran, hingga ongkos politik yang harus ditanggung kandidat. Sugiono mengungkapkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pilkada hampir mencapai Rp 7 triliun. Jumlah itu terus meningkat dan pada 2024 melonjak menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

"Ini merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujar Sugiono.

Selain beban anggaran negara, Sugiono menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Kondisi tersebut, menurut dia, sering kali menghambat munculnya figur-firug potensial yang sebenarnya memiliki kapasitas memimpin daerah.

"Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi

kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," katanya.

Sugiono menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak serta-merta menghapus prinsip demokrasi. Anggota DPRD yang memilih kepala daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Selain itu, masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawal aspirasi melalui lembaga perwakilan.

RUU Pemilu kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan akan dibahas di Komisi II DPR. Revisi UU Pemilu dirancang tidak hanya membahas pemilu nasional, tetapi juga mengintegrasikan UU Pilkada dan UU Partai Politik melalui pendekatan kodifikasi guna menyatukan sistem kepemiluan.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan bahwa ide perubahan sistem pilkada merupakan gagasan lama Abdul Muhammin Iskandar. Bahkan, PKB telah mengusulkannya jauh sebelum Pilkada 2024 berlangsung. (wid,ist,rls/dya)

ICW Sebut Justru Memfasilitasi Politik Transaksional

INDONESIA Corruption Watch atau ICW menilai wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada oleh DPRD sebagai gagasan yang tak beralasan.

Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara mengatakan, alih-alih menyasar perbaikan sistem kepemiluan serta pembiayaan politik secara utuh, wacana yang digulirkan partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto justru hanya mensimplifikasi persoalan pilkada.

"Mengembalikan mekanisme pilkada dipilih DPRD artinya sengaja meletakkan pilkada pada mekanisme yang sudah pasti lebih merugikan," kata Seira dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Dia menjelaskan pertimbangan ICW menolak wacana pilkada dipilih DPRD. Pertama, jika alasan pemerintah menghapus pilkada langsung oleh rakyat karena besarnya anggaran yang digelontorkan, maka pertimbangan itu tak berlogika.

Sebab, kata dia, bila dibandingkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang mencapai Rp 37 triliun misalnya, jumlah tersebut masih lebih kecil ketimbang anggaran penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di

tahun serupa yang ditaksir mencapai Rp 71,3 triliun.

"Jika besarnya anggaran adalah tolak ukur, apakah pemilu yang diselenggarakan secara langsung juga harus diubah mekanismenya?" ujar Seira.

Kemudian, dia melanjutkan, anggaran Pilkada 2024 juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang sarat persoalan tata kelola, namun memiliki besaran anggaran hingga Rp 71 triliun di 2025.

Tidak tersentuhnya anggaran MBG, menurut Seira, justru menunjukkan jika besarnya anggaran bukan masalah sesungguhnya yang saat ini tengah dibahas oleh pemerintah terkait wacana pilkada tak langsung.

Pertimbangan kedua penolakan pilkada dipilih DPRD, Seira mengatakan, ialah logika pilkada langsung yang sebetulnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya politik transaksional ketika mekanisme pilkada tak langsung dielakkan sebelumnya.

ICW juga mengingatkan ihal catatan yang sempat dirilis sebelumnya terkait jumlah anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Sebelum Pilkada 2024 dihelat, ICW mencatatkan 545 anggota DPRD terjerat rasuhan sepanjang 2010-2024.

"Artinya, pilkada dipilih DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang dan justru berpotensi meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi oleh masyarakat," ucap Seira.

Pertimbangan ketiga, kata dia, ekosistem pembiayaan politik yang berkontribusi pada terjadinya lingkar korupsi politik. Sejak tahap awal pelaksanaan pilkada, partai kerap menuntut mahar yang harus disetor pasangan calon guna mengamankan tiket dukungan partai.

Modal besar yang digelontorkan sejak awal inilah, menurut dia, yang membuat ongkos politik mahal dan menjadikan kepala daerah kerap terjerat kasus korupsi.

"Alih-alih melihat serius masalah sebenarnya, pemerintah justru sedang memfasilitasi terjadinya politik transaksional yang berdampak pada tergerusnya kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada mendatang," katanya.

Sebelumnya, usul menggulirkan kembali pilkada dipilih DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu 20 Desember lalu. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan, pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik. (gus,tmo,ist/dya)

WANTI-WANTI PURBAYA SOAL DANA CADANGAN BENCANA: CAIRKAN, JANGAN HANGUS!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera mencairkan dana tanggap darurat atau cadangan bencana. Saat ini anggaran yang tersedia dalam dana cadangan bencana sebanyak Rp 1,51 triliun. Purbaya mewanti-wanti agar dana tersebut segera digunakan karena akan hangus jika tidak dicairkan. Jika hangus tahun ini, maka dampaknya akan menjadi pengurang di anggaran tahun depan.

Menkeu Purbaya buka suara soal permintaan tambahan anggaran terkait penganganan bencana banjir Sumatra hingga Aceh. Hal itu disampaikan Purbaya saat rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025). Purbaya pun heran lantaran permintaan tambahan anggaran dinilai lambat dan sedikit.

"an suhu tubuh (thermal scanning), se"Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok (atau diajukan) hari ini, hari ini pak, biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang," kata dia dalam rapat satgas pemulihan pasca bencana yang disiarkan secara virtual.

Purbaya mengatakan dana itu juga dapat digunakan semua yang berkaitan dengan pemulihan bencana, baik itu perbaikan infrastruktur dan pembangunan hunian sementara dan



Banjir Lagi di Padang

Bangunan terendam air di dekat sungai Batang Air Dingin, Lubuk Minturun, Padang, Sumatra Barat, Selasa (30/12/2025) akibat hujan lebat yang melanda sejak siang. Diketahui bantaran tersebut dilanda banjir bandang sejak bulan lalu. (Ist.ANTARA)

hunian tetap.

"Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau. Kalau hunian sementara dan hunian, tetap itu totalnya sudah yg

dibangun bisa ke kita, kita cairkan, melalui channel BNPB tadi," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya

Tito Minta Menkeu Buka Blokir Anggaran Rp 20M untuk Praja IPDN di Lokasi Bencana

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk mendukung penerjungan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah terdampak bencana di Sumatera. Anggaran tersebut merupakan dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, Selasa (30/12/2025).

"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito.

La menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih

diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan.

"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya.

Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana. Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.

"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti," ucap Tito.

Selain mendukung aktivitas pemerintahan, Praja IPDN juga akan membantu membersihkan kantor-

kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur. Tito menyebut, hingga kini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang belum bisa digunakan akibat dampak bencana.

"Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk lumpur, tidak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.

"Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi, kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum," pungkasnya. (wid,rls/dya)

ANGGARAN PEMULIHAN BENCANA SUMATERA

RINCIAN alokasi anggaran

	Aceh	Rp 33,75 triliun
	Sumatera Barat	Rp 13,5 triliun
	Sumatera Utara	Rp 12 triliun

Data korban bencana (BNPB)

	Meninggal dunia	1.137 jiwa
	Hilang	163 orang
	Mengungsi	457.200 jiwa

Kerusakan Infrastruktur

	Rumah rusak	157.838 unit
•	Rusak berat	47.165 unit
•	Rusak sedang	33.276 unit
•	Rusak ringan	77.397 unit
	Fasilitas kesehatan rusak	215 unit
	Fasilitas pendidikan rusak	3.188 unit
	Jembatan putus	98 unit
	Rumah ibadah rusak	806 unit
	Jalan terputus	101 ruas

Sumber: Mendagri Tito Karnavian Rakor Selasa (30/12/2025).

juga menyampaikan kepada KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk membayar utang pembangunan jembatan.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak (melirik ke Maruli)," ucapnya. (wid,rls,ant/dya)